

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman antar daerah yang tinggi, keragaman antar daerah tersebut terjadi karena adanya perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya dimana sebaran sumber daya alam serta pertumbuhan pusat perdagangan dan industri hanya terkonsentrasi pada beberapa tempat saja. Hal tersebut membuat pembangunan ekonomi daerah yang memiliki keunggulan pada salah satu bidang menjadi lebih tinggi dari daerah lainnya.

Pembangunan yang merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena itu untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah,

Adapun upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu:

1. Mengupayakan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mencari terobosan-terobosan inovatif yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah.
2. Berkaitan dengan penghematan biaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting bagi pemerintah daerah diharapkan dapat

melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dilimpahkan, sekaligus dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik dan mengembangkan suatu daerah yang disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan di masing-masing daerah.

Kenyataan ini mengakibatkan beban berat bagi pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah memberlakukan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana kedua undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan porsi keuangan yang lebih besar yang pada akhirnya berimplikasi kepada pembangunan daerah karena kepemilikan sumber daya daerah yang berbeda-beda. Konsep Otonomi Daerah merupakan konsep yang relevan dan paling tepat karena konsep ini memberikan kepada daerah wewenang untuk mengarahkan kebijakan di daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan setiap daerah kabupaten dan kota untuk bisa mengurangi ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat atau provinsi, sehingga setiap daerah kabupaten dan kota harus bisa membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab pembangunan daerah yang bersumber dari PAD, khususnya komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang perlu ditingkatkan. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen terpenting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan Simanjuntak (2012:30). Semestinya adalah sumber penerimaan utama bagi daerah sehingga ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) semakin berkurang, yang semestinya daerah diharapkan memiliki tanggungjawab tinggi terhadap masyarakat daerah sekitar. Apabila hal ini terjadi menunjukkan

bahwa pemerintah telah berhasil menjalankan otonomi daerah begitu pun sebaliknya.

Berikut perkembangan Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2014 sampai dengan 2017.

**Tabel 1.1**  
**Pajak Daerah 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2014-2017**

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	Target	Realisasi Pajak Daerah	(%) Pajak Daerah
1	Banyuasin	2014	32.132..093.699	51,699,114,949	160,90
		2015	38.935.490.935	39,302,525,099	100,94
		2016	53.279.093.975	56,841,656,914	106,69
		2017	61.394.731.000	72.514.691.201	118,11
2	Empat Lawang	2014	8.321.970.000	11,867,820,936	142,61
		2015	10.752.091.630	9,063,386,243	84,29
		2016	10.752.091.630	9,772,694,199	90,89
		2017	10.752.091.630	10.019.913.220	93,19
3	Lahat	2014	31.071.121.275	57,855,199,840	186,20
		2015	100.751.461.479	102,996,653,871	102,23
		2016	85.075.585.774,59	33,722,143,792	39,64
		2017	174.466.367.801	37.008.535.966	21,21
4	Muara Enim	2014	40.689.229.197	47,806,860,511	117,49
		2015	65.230.418.945	70,755,225,873	108,47
		2016	51.767.967.010	52,948,650,683	102,28
		2017	56.346.779.302	62.718.676.209	111,30
5	Musi Banyuasin	2014	56.326.812.000	61,581,296,010	109,33
		2015	64.500.000.000	53,150,297,671	82,40
		2016	66.037.462.273	59,484,298,430	90,08
		2017	69.978.188.000	58.677.094.555	83,85
6	Musi Rawas	2014	23.180.601.764	45,848,971,879	197,79
		2015	39.030.601.765	22,465,632,348	57,56
		2016	35.813.418.254	24,228,776,676	67,65
		2017	31.607.456.500	26.940.641.904	85,24
7	Musi Rawas Utara	2014	4.166.518.091	7.435.310.229	178,45
		2015	7.250.123.091	7.558.392.346	104,25
		2016	10.865.823.091	13.051.897.933	120,12
		2017	11.457.658.091	10.032.140.048	87,56
8	Ogan Ilir	2014	71.865.202.344	10,554,904,008	14,69
		2015	97.423.540.271	13,341,254,767	13,69

		2016	229.830.499.453	62,843,668,168	27,34
		2017	151.875.213.318	15.769.597.192	10,38
9	Ogan Komering Ilir	2014	23.180.601.764	80,464,886,083	197,79
		2015	30.744.265.517	34,190,221,449	111,21
		2016	20.068.327.509	21,849,570,409	108,88
		2017	38.888.500.000	37.271.211.375	95,84
		2014	21.549.854.806	23,886,691,409	110,84
10	Ogan Komering Ulu	2015	24.783.610.801	27,485,642,547	110,90
		2016	19.964.547.531	26,338,589,960	131,93
		2017	32.808.004.898	38.559.592.287	117,53
		2014	3.985.300.000	5,411,353,281	135,78
11	Ogan Komering Ulu Selatan	2015	6.041.000.000	11,081,088,475	183,43
		2016	7.641.000.000	8,015,920,952	104,91
		2017	8.003.500.000	12.114.840.273	151,37
		2014	11.686.200.000	17,632,593,780	150,88
12	Ogan Komering Ulu Timur	2015	14.766.900.000	19,946,382,463	135,07
		2016	18.951.390.000	21,195,826,198	111,84
		2017	21.221.390.000	28.519.990.237	134,39
		2014	2.261.940.613	2.923.744.533	129,25
13	Pali	2015	24.046.029.106	7.375.622.327	30,67
		2016	35.271.945.033	26.350.314.142	74,71
		2017	29.842.419.610	12.062.403.805	40,42
		2014	23.064.455.622	17,858,006,342	77,43
14	Lubuk Linggau	2015	23.505.455.622	19,666,150,225	83,67
		2016	44.381.773.400	22,254,693,729	50,14
		2017	48.539.122.600	29.121.881.916	60,00
		2014	4.736.500.000	5,032,612,585	106,25
15	Pagaram	2015	5.192.693.675	5,545,462,587	106,79
		2016	5.277.693.675	5,761,651,415	109,17
		2017	5.224.020.579	7.093.380.548	135,78
		2014	395.888.500.000	463,574,599,151	117,10
16	Palembang	2015	478.025.367.500	479,112,899,223	100,23
		2016	526.867.498.866	536,552,681,049	101,83
		2017	638.549.551.000	680.012.752.910	106,49
		2014	18.510.000.000	18,822,366,243	101,69
17	Prabumulih	2015	20.545.000.000	20,179,756,936	98,22
		2016	22.865.000.000	21,849,772,603	95,56
		2017	30.345.028.000	24.791.075.219	92,25

Sumber: Laporan Hasil Keuangan BPK RI Tahun 2014-2017, data yang diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas bahwa fenomenya persentase penerimaan pajak daerah terhadap realisasi penerimaan pajak daerah di 17 (tujuh belas)

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi dalam kurun (empat) tahun terakhir yaitu 2014 sampai dengan 2017, hanya terdapat 7 (tujuh) Kabupaten dan Kota yang telah memenuhi target yang telah direncanakan. Adapun tujuh Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Selatan, Kabupaten Ogan Komering Timur, Kota Pagaralam dan Kota Palembang. Dari hal tersebut pasti ada faktor yang menyebabkan adanya daerah yang memenuhi target penerimaan pajak daerah dan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak daerah di setiap Kabupaten/Kota. Realisasi penerimaan pajak yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dikarenakan adanya kendala, salah satunya sumber-sumber penerimaan sektor pajak daerah yang potensial yang masih perlu di gali secara maksimal tetap dalam batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum adanya sanksi yang tegas bagi penunggak pajak.

Peningkatan PAD khususnya pajak daerah suatu wilayah tentu tidak terlepas dari kondisi ekonomi suatu daerah yang terlihat dari peningkatan PDRB. Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada pada akhirnya meningkatkan PDRB. Hal ini dikarenakan sektor-sektor pajak daerah ada dalam PDRB (Shiska dan Nizaruddin:2009). PDRB pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, dengan demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah sehingga semakin besar PDRB maka akan semakin besar pula tingkat realisasi penerimaan pajak daerah. PDRB telah menjadi pendekatan model yang sering digunakan banyak negara sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan, ekonomi penduduk sehingga ada kecenderungan pendapatan penduduk meningkat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan menjadi peluang bagi pemerintah kabupaten dan kots untuk menggali potensi pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah kedepannya.

Untuk mengetahui seberapa besar proporsi PDRB di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2014 sampai dengan 2017 pada Tabel.1.2.

**Tabel 1.2**  
**PDRB 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2014-2017**

No	Kabupaten/Kota	PDRB ADHK 2010 (Milyar Rupiah)			
		2014	2015	2016	2017
1	Banyuasin	15.380,59	16.236,00	17.190,46	18.063,52
2	Empat Lawang	2.836,12	2.963,78	3.098,26	3.213,15
3	Lahat	10.317,90	10.537,52	10.830,61	11.255,34
4	Muara Enim	29.041,41	31.253,27	32.892,45	35.761,59
5	Musi Banyuasin	38.397,35	39.272,81	40.225,89	41.439,12
6	Musi Rawas	10.510,08	11.049,70	11.647,49	12.254,43
7	Musi Rawas Utara	4.606,17	4.759,31	4.925,76	5.126,63
8	Ogan Ilir	5.852,73	6.122,37	6.431,68	6.761,84
9	Ogan Komering Ilir	15.902,78	16.668,45	17.450,46	18.297,69
10	Ogan Komering Ulu	7.987,73	8.230,96	8.556,15	8.892,49
11	Ogan Komering Ulu Selatan	4.503,08	4.707,44	4.951,26	5.174,85
12	Ogan Komering Ulu Timur	7.821,52	8.354,95	8.805,05	9.039,93
13	Pali	3.577,35	3.736,27	3.930,64	4.165,32
14	Lubuk Linggau	3.235,62	3.439,78	3.646,01	3.875,10
15	Pagaralam	1.814,40	1.892,92	1.974,61	2.069,29
16	Palembang	78.079,09	82.329,66	87.088,35	92.454,78
17	Prabumulih	4.097,01	4.295,41	4.587,79	4.829,59

Sumber: Laporan BPS Dalam Angka Tahun 2014-2017, data yang diolah (2018)

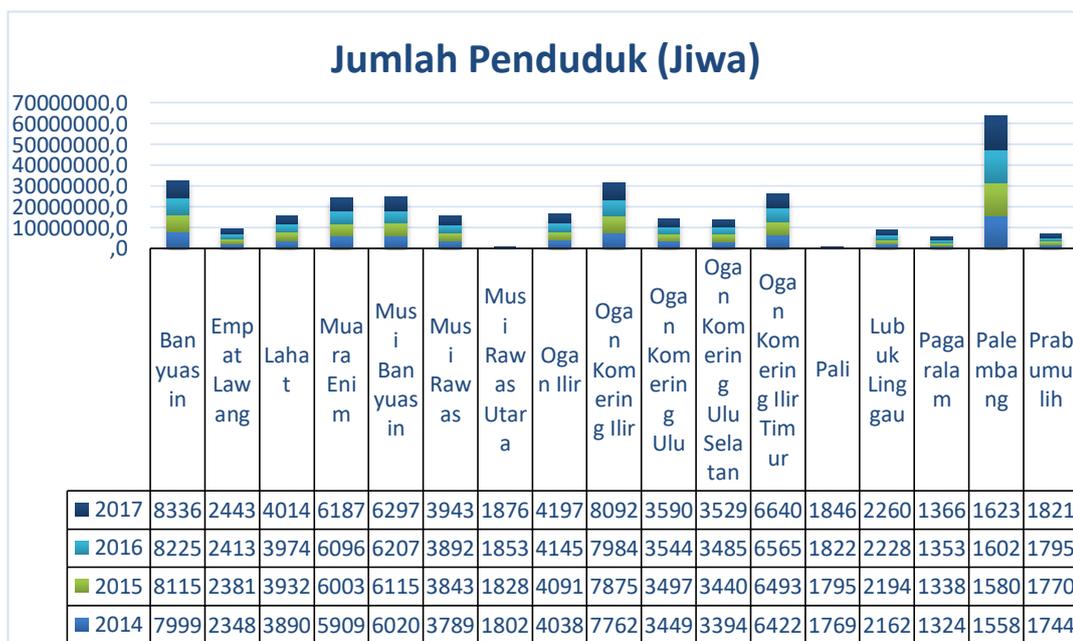
Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah PDRB terjadinya kenaikan setiap tahunnya di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2014-2017. Berdasarkan jumlah PDRB yang mengalami kenaikan terbesar diperoleh oleh Kota Palembang. PDRB Kota Palembang mengalami kenaikan dari tahun 2014-2015 sejumlah Rp 4.250,57 atau sebesar 5,44% selanjutnya di tahun 2015-2016 yang mengalami kenaikan sejumlah Rp

4.758,69 atau sebesar 5,78% dan di tahun 2016-2017 yang mengalami kenaikan sejumlah Rp 5.366,43 atau sebesar 6,16%.

Selain variabel PDRB, adanya variabel jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam suatu negara dan mempunyai pengaruh yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan dan penurunan di penerimaan pajak daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Norfridwitya dalam Susanto (2014) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah apabila Jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang diterima akan meningkat karena adanya jumlah penduduk yang produktif didalam perekonomian. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Helti (2010) menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena masih adanya penduduk yang bersekolah, banyaknya pengangguran, dan tidak semua penduduk memiliki pekerjaan atau usaha yang dikenakan pajak daerah. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah penduduk di 17 (tujuh belas) Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan, untuk periode 2014-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

**Gambar 1.1**

**Jumlah Penduduk 17 Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2014-2017**



Sumber: Laporan BPS Dalam Angka Tahun 2014-2017, data yang diolah (2018)

Berdasarkan Tabel diatas bahwa jumlah penduduk di seluruh Kabupaten/ Kota dari tahun 2014-2017 pada tabel 1.3 yang mengalami kenaikan pada jumlah penduduk kenaikan terbesar terjadi di Kota Palembang.

Selain variabel PDRB dan jumlah penduduk digunakan variabel lain yaitu belanja daerah. Dalam konteks daerah provinsi atau kabupaten/kota pengalokasian tersebut tergambar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah dilaksanakannya otonomi daerah melalui Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing-masing berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada di wilayah bersangkutan. Banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam pembangunan daerahnya. Kesulitan-kesulitan tersebut merupakan tantangan besar yang harus dihadapi serta ditangani oleh pemerintah daerah dengan kembali memikirkan mengenai strategi-strategi pembangunan yang harus dilakukan. Dalam teori ekonomi makro dari sisi pengeluaran, adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah merupakan bentuk rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah (Gathama, 2009). Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan potret pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pada komponen Belanja Daerah juga nampak seberapa besar porsi belanja modal yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mengetahui besar proporsi Belanja Daerah 17 (tujuh belas) Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2017 di Tabel 1.4.

**Tabel 1.4**  
**Belanja Daerah 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2014-2017**

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Belanja Daerah ( Dalam Jutaan)			
		2014	2015	2016	2017
1	Banyuasin	1.915.162	1.540.083	1.602.242	1.628.359
2	Empat Lawang	818.382	705.544	648.861	722.850
3	Lahat	1.388.479	1.559.989	1.545,145	1.408.832
4	Muara Enim	1.783.781	2.112.376	2.114.999	2.250.529
5	Musi Banyuasin	3.178.356	1.899.319	2.280.009	2.340.644
6	Musi Rawas	1.219.190	1.405.099	1.531.168	1.443.832
7	Musi Rawas Utara	561.466	670.724	720.301	677.194
8	Ogan Ilir	990.876	964.153	1.102.973	1.355.054
9	Ogan Komering Ilir	1.491.571	1.745.362	1.979.334	2.108.841
10	Ogan Komering Ulu	1.010.420	1.085.467	1.160.526	1.381.985
11	Ogan Komering Ulu Selatan	848.505	1.020.060	1.190.079	1.213.827
12	Ogan Komering Ulu Timur	1.085.447	1.158.799	1.285.585	1.289.877
13	Pali	443.217	622.474	743.680	865.926
14	Lubuk Linggau	896.993	821.639	809.943	870.709
15	Pagaralam	804.431	796.245	798.330	743.610
16	Palembang	2.812.465	2.868.750	2.914.627	3.141.848
17	Prabumulih	925.014	930.835	877.919	847.874

Sumber: Laporan Hasil Keuangan BPK RI Tahun 2014-2017, data yang diolah (2018)

Berdasarkan Tabel diatas bahwa Belanja Daerah dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir yaitu 2014-2017 sebagaimana terlihat pada tabel 1.4,memiliki tingkat belanja daerah yang penurunan dan kenaikan di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Adanya penurunan belanja daerah di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2014-2015 sejumlah Rp 1.279.036.759.814 atau sebesar 40,24% kemudian mengalami penurunan drastis di tahun 2015-2016 sejumlah Rp 380.689.644.763 atau sebesar 20,04% dan mulai mengalami stabil di tahun 2016-2017 sejumlah Rp 60.635.648.180 atau sebesar 2,65%. Sedangkan pada Kota Palembang pada tingkat belanja daerah mengalami sedikit kenaikan setiap tahunnya mulai tahun 2014-2015 sejumlah Rp 56.284.987.102 atau sebesar 2,00% kemudian tahun 2015-2016 sejumlah Rp 45.877.627.163 atau sebesar 1,59 % dan tahun 2016-2017 sejumlah Rp 227.220.670.967 atau sebesar 7,79%.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

menguji penelitian ini yang telah dilakukan oleh Hidayati Sania, Dkk(2018) mengenai jumlah penduduk, PDRB dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini dari sisi variabel dimana peneliti tidak menggunakan inflasi. Peneliti menggunakan tiga variabel independen yaitu PDRB, Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah. Populasi yang peneliti ambil adalah 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian dan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul dalam penelitian ini adalah *“Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan”*.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah PDRB berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Belanja Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas agar lebih terarah dan tidak menyimpang maka dalam skripsi ini peneliti hanya membahas mengenai pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan selama Tahun 2014-2017.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh Belanja Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan wawasan bagi peneliti terkait topik sejenis serta dapat dijadikan perbandingan yang di dapat dari teori-teori perkuliahan khususnya mengenai PDRB, jumlah penduduk dan belanja daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah

#### **2. Bagi Pihak Akademis**

Dijadikan sebagai referensi dan pengayaan perpustakaan di jurusan Akuntansi terkhususnya yang berminat pada penulisan akuntansi pemerintahan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Guna membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang

ada akan dibahas, dimana tiap-tiap bab memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang apayang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan.

**BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori dari literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah meliputi pdrb, jumlah penduduk dan belanja daerah pada penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan.

**BAB III          METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi identifikasi variabel dan definisi operasional variabel, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

**BAB IV          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan Eviews versi 10 sebagai alat bantu dalam pengelolaan data. Selain itu juga akan dijelaskan hasil pengujian hipotesis penelitian ini.

**BAB V            PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan datang.